

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Menurut UU No 23 Tahun 2014 otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan kebebasan pada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya agar terwujudnya pemerataan pembangunan pada daerah-daerah dan dapat memberikan yang pelayanan kepada masyarakat, sehingga daerah yang mendapatkan otonomi daerah akan lebih bisa mengatur pembangunan di daerahnya sendiri sehingga bisa lebih fokus dan maju.

Penerapan otonomi daerah berdasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 dengan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi luas yaitu kepala daerah diberikan wewenang untuk mengatur pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat. Prinsip otonomi nyata yaitu wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang ada sesuai dengan potensi daerah. Sementara

itu, prinsip otonomi bertanggung jawab yaitu penyelenggaraan otonomi harus sejalan dengan tujuan pemberian otonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah otonom melalui desentralisasi hakikatnya merupakan penciptaan efisiensi dan inovasi dalam pemerintahan karena otonomi untuk kepentingan masyarakat di daerah dengan desentralisasi tersebut pemerintah memiliki peluang untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah berdasarkan pada peraturan daerah yang berlaku. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, pinjaman daerah dan pendapatan daerah lain yang sah. Besarnya pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor yang sangat penting dalam menciptakan kemandirian daerah dimana Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber pendapatan dari daerahnya sendiri. Perkembangan PAD di Wilayah Karesidenan Surakarta mengalami kenaikan dari tahun 2015-2017. Jumlah PAD yang tinggi adalah Kota Surakarta sebesar Rp 527.538.846.222, sedangkan Kabupaten Wonogiri dengan PAD terkecil dengan jumlah Rp 333.840.434.900. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
di Wilayah Karesidenan Surakarta
Tahun 2015-2017

Pendapatan Asli Daerah				
No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017
1	Surakarta	372.798.426.790	425.502.779.064	527.538.846.222
2	Sragen	267.711.820.479	297.176.332.577	404.555.764.783
3	Boyolali	260.633.637.930	292.310.032.230	388.014.880.210
4	Karanganyar	216.509.544.000	255.442.882.500	412.876.345.685
5	Klaten	190.662.670.128	224.197.408.481	371.718.439.306
6	Sukoharjo	313.947.492.000	363.163.428.000	464.567.410.000
7	Wonogiri	208.734.603.000	218.604.854.600	333.840.434.900

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota Karesidenan Surakarta)

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan perubahan ekonomi yang terjadi dan untuk mengetahui keberhasilan suatu pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator yang membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja agar terlaksananya pembangunan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan kegiatan pembangunan infrastruktur. Pengeluaran tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi. Pengukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah Produk Domestik Bruto. PDB adalah suatu acuan untuk mengukur pendapatan dan pengeluaran dalam suatu perekonomian dalam waktu tertentu dimana dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB berdasarkan pada harga konstan (*PDB rill*) sehingga angka pertumbuhan yang dihasilkan

adalah pertumbuhan riil karena atas pertumbuhan produksi (Mankiw, 2006:5).

Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin tinggi pendapatan masyarakat maka kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah juga tinggi. Apabila PDRB mengalami peningkatan maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan yang diharapkan akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga diharapkan akan meningkatkan produktivitasnya. Penambahan penduduk yang tinggi dan diikuti dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk adalah satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Apabila jumlah penduduk meningkat maka pendapatan juga meningkat Santosa dan Rahayu (2005).

وَل تَأْكُلُوا مِمَّا بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(ال بقرة : 188)

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah: 188)

Tabel 1.2
Pengeluaran Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota
di Wilayah Karesidenan Surakarta
Tahun 2016-2017

Pengeluaran Pemerintah			
No	Kabupaten/Kota	2016	2017
1	Surakarta	1.680.456.921.161	1.768.346.964.316
2	Sragen	2.116.629.412.523	2.202.039.260.704
3	Boyolali	2.086.513.803.200	2.176.121.168.000
4	Karanganyar	2.086.307.677.600	2.066.524.668.105
5	Klaten	2.282.330.771.499	2.481.861.743.842
6	Sukoharjo	1.879.860.885.000	1.887.503.285.000
7	Wonogiri	2.132.909.652.040	2.132.909.652.040

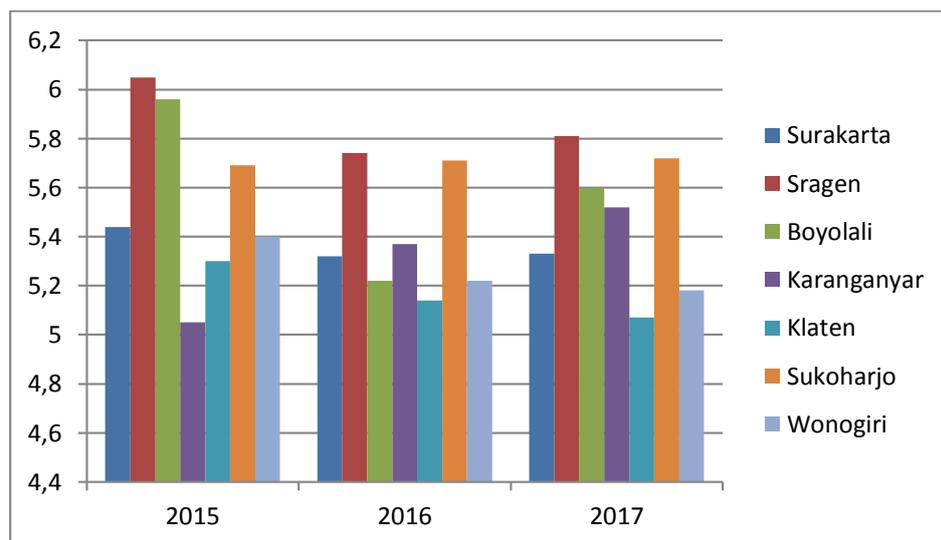
(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota Karesidenan Surakarta)

Berdasarkan pada tabel 1.2, besarnya pengeluaran pemerintah di Wilayah Karesidenan Surakarta setiap daerah berbeda-beda dan pengeluarannya cenderung mengalami kenaikan. Pengeluaran pemerintah di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2017 sebesar Rp 2.066.524.668 lebih kecil dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.086.307.677 atau mengalami penurunan sebesar Rp 19.783.009. Pengeluaran pemerintah tertinggi pada tahun 2017 yaitu Kabupaten Klaten dengan pengeluaran sebesar Rp 2.481.861.743 dan pengeluaran terendah pada tahun 2017 yaitu Kota Surakarta dengan pengeluaran sebesar Rp 1.768.346.964.316.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap Kabupaten/Kota di Wilayah Karesidenan Surakarta mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan setiap tahun dan tidak mengalami penurunan. Pertumbuhan PDRB tertinggi pada tahun 2017 adalah Kabupaten Sragen dengan pertumbuhan sebesar 5,81% sedangkan

pertumbuhan PDRB terendah pada tahun 2017 adalah Kabupaten Klaten dengan pertumbuhan sebesar 5,07%. Penjelasan pertumbuhan PDRB dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Konstant 2010 Menurut Kabupaten/Kota
di Wilayah Karesidenan Surakarta
Tahun 2015-2017



(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota Karesidenan Surakarta)

Jumlah penduduk di Wilayah Karesidenan Surakarta dari tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan. Kabupaten Klaten dengan jumlah penduduk tertinggi dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada tahun 2017 sebesar 1.167.401 selanjutnya Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar sedangkan jumlah penduduk terendah adalah Kota Surakarta dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebesar 516.102. Penjelasan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Wilayah Karesidenan Surakarta
Tahun 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
1	Surakarta	507.825	510.077	512.226	514.171	516.102
2	Sragen	871.991	875.615	879.027	882.090	885.112
3	Boyolali	951.809	957.913	963.690	969.325	974.579
4	Karanganyar	840.199	848.326	856.198	864.021	871.596
5	Klaten	1.149.002	1.154.028	1.158.795	1.163.218	1.167.401
6	Sukoharjo	849.392	856.861	864.207	871.397	878.374
7	Wonogiri	942.377	945.817	949.017	951.975	954.706

(Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang harus ditingkatkan potensinya agar dapat menanggung sebagian belanja daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan suatu daerah sehingga prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat terlaksana dengan baik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran rutin yang digunakan untuk pembangunan dan belanja daerah sehingga akan meningkatkan kegiatan ekonomi. Apabila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat maka akan meningkatkan pendapatan daerah sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Faktor lain yang juga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk diharapkan akan mendorong jumlah lapangan pekerjaan sehingga masyarakat dapat meningkatkan produktivitasnya dan meningkatkan jumlah pendapatan daerah.

Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (2017:53) jumlah penduduk di Jawa Tengah 34.257.865 jiwa. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi terpadat ketiga dengan jumlah penduduk terpadat dengan kepadatan 1.053 jiwa setiap kilometer persegi. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Karesidenan Surakarta yang terdiri dari 7 Kabupaten/Kota yang memiliki ciri khas masing-masing yang meliputi sektor pariwisata, sektor perdagangan, dan sumber daya alam berbeda yang berpotensi menghasilkan pendapatan daerah yang besar. Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Karesidenan Surakarta mengalami peningkatan setiap tahun. Agar pendapatan maksimal, pemerintah harus terus menggali potensi-potensi pendapatan daerah. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian yang dilakukan oleh Priyono (2016) diperoleh hasil bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu Rani (2016) juga melakukan penelitian dengan diperoleh hasil Jumlah Penduduk berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Karesidenan Surakarta sebagai

penulisan karya ilmiah atau skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Karisidenan Surakarta”.

B. Batasan Masalah

Permasalahan pada penelitian ini dibatasi, yaitu membahas mengenai variabel-variabel yang menjadi objek penelitian antara lain Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk. Pada penelitian ini yang digunakan adalah data di Karisidenan Surakarta yang meliputi 7 Kabupaten pada tahun 2006-2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dibahas di atas, dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang akan dijelaskan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Karesidenan Surakarta?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Karesidenan Surakarta?
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Karesidenan Surakarta?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Karesidenan Surakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Karesidenan Surakarta.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Karesidenan Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak dan instansi terkait sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Karesidenan Surakarta.

2. Bagi Instansi

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah di Karesidenan Surakarta dan Badan Pendapatan Daerah Karesidenan Surakarta dalam rangka mendalami sumber peningkatan pendapatan

daerah di Karesidenan Surakarta dan potensinya dalam rangka pembangunan daerah.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat menjadi referensi, bahan perbandingan penelitian lain dan memberikan sumbangan pemikiran pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

4. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan untuk pemerintah dalam menentukan kebijakan dan strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.